

AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI PENANGKAL RADIKALISME

**Achmad Khoirun Ni'am Aljunaidi, Moh. Fairus Heriawan, Hildan Deswari,
Marky Cavalera Prasetya. Ari Metalin Ika Puspita**

Universitas Negeri Surabaya Email : achmad.23172@mhs.unesa.ac.id |
mohfairus.23174@mhs.unesa.ac.id | marky.23167@mhs.unesa.ac.id |
hildan.23170@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang dapat mewujudkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia. Ini harus dipertimbangkan karena terpaan radikalisme yang saat ini menyasar generasi muda. Untuk itulah lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada peserta didiknya sedini mungkin, agar nilai-nilai kebersamaan dan persatuan yang dijunjung tidak intoleran. Hal ini juga yang dilakukan di lingkungan civitas academica Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengungkap fakta tersebut adalah studi kasus, yang menggambarkan interaksi sosial melalui survei mendalam yang intensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa UNESA, baik secara institusional maupun individual, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada, baik suku, ras, maupun golongan. UNESA menanamkan nilai pancasila pada setiap mahasiswa melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Narasi yang dibangun bagi mahasiswa adalah saling mencintai karena merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilakukan.

Kata Kunci : Nilai Pancasila, Aktualisasi, Berbangsa, Bernegara, Radikalisme.

Abstract

As the foundation of the Indonesian state, Pancasila has positive values that can manifest in all aspects of people's lives, including the younger generation who will continue the leadership of the Indonesian nation. This should be considered due to the exposure of radicalism that is currently targeting the younger generation. For this reason, educational institutions need to instill the noble values of Pancasila to their students as early as possible, so that the values of togetherness and unity that are upheld are not intolerant. This is also done in the academic community of Surabaya State University (UNESA) Indonesia.

The method used to uncover this fact is a case study, which describes social interactions through an intensive in-depth survey. The results stated that UNESA, both institutionally and individually, practiced the values of Pancasila by respecting existing differences, both ethnic, racial, and class. UNESA instills Pancasila values in every student through religious and educational activities. The narrative built for students is to love each other because it is a mandate given by God to humans to do.

Keywords : Pancasila value, actualization, nationship, citizenship, radicalism.

PENDAHULUAN

Keberagaman yang terkandung dalam eksistensi masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lainnya. Terdapat berbagai bentuk keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu adanya kemajemukan suku, budaya, bahasa, etnis termasuk agama. Keberagaman tersebut telah terjalin dan terbina sejak dulu kala serta semakin terjalin erat dalam sebuah keharmonisan pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal tersebut tercermin dari adanya perilaku masyarakat yang dengan senang hati bersedia hidup berdampingan, tenggang rasa, serta saling menghargai berbagai perbedaan yang terdapat di dalamnya.

Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam berperilaku karena ideologi yang terkandung di dalamnya mendidik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi ideologi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai ke Rote. Karena itu sikap dari seseorang yang suka membenci atau menolak berbagai perbedaan yang ada, haruslah ditinggalkan dan bersedia membuka diri untuk hidup berdampingan dalam suatu hubungan persatuan yang harmonis.

Landasan falsafah NKRI yaitu Pancasila harusnya dijaga dan dihidupi oleh setiap warga Indonesia disebabkan ideologi Pancasila ditelurkan dari nilai-nilai kehidupan yang kemudian dirumuskan ke dalam butir-butir/sila-sila yang mengikat setiap masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi ikatan persatuan dalam keberagaman maupun kemajemukan yang ada.

Kaelan dan Zubaidi (2007) menyatakan rumusan sila pada Pancasila merupakan dasar falsafah negara yang menjadi sistem nilai yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kariyadi dan Suprpto (2017) menambahkan "nilai-nilai Pancasila yang terangkum dalam ke-lima butir sila merupakan acuan berperilaku oleh setiap warga Indonesia demi menjaga keutuhan setiap elemen bangsa Indonesia yang beranekaragam."

Ancaman radikalisme dalam negara Pancasila menjadi isu penting di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berbagai riset dan kajian tentang fenomena berkembangnya paham radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme semakin meningkat. Isu dan fokus perhatian yang menjadi pendekatan dan sudut pandang adalah konflik atas nama agama, dan agama menjadi alat konflik, serta konflik perbedaan pemahaman tentang menata kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam perspektif ilmu kewarganegaraan, radikalisme menjadi persoalan dan masalah dalam demokrasi karena radikalisme memiliki paham dan nilai-nilai yang tidak berlandaskan pada nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada dalam kewarganegaraan. Prisma volume 39 mengulas topik Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme dari aspek terminologi dan gejala agresi masyarakat dalam urusan agama yang menempatkan negara sebagai lawan dari agama (Prisma, 2020). Masalah klasik

yang selalu timbul di Indonesia ialah masalah hubungan negara dan agama, dan hubungan Pancasila dan agama (Ali, 2009). Hal ini selalu menjadi pertentangan dalam ruang publik dan politik yang pada akhirnya menimbulkan kerawanan ideologis. Menurut Kaelan gerakan fundamentalisme pada dasarnya menggunakan dalil ayat Al-Qur'an sebagai pembenar, serta menafsirkan Al-Qur'an dengan melakukan manipulasi makna dan diformulasikan dengan bahasa yang positif dan logis (Kaelan, 2015).

METODE

Fenomena yang berkembang pada Masyarakat Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti radikalisme, penyalahgunaan narkoba, menurunnya nilai-nilai kemanusiaan (kejujuran, kebaik-hatian, tergantikan dengan kepongahan, ketidakpedulian, dan sebagainya), ketidakpuasan masyarakat yang diejawantahkan dalam demo-demo yang menunjukkan buntunya komunikasi antar berbagai pihak di Indonesia, dan kurang/tidak kompetitifnya lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Globalisasi.

Krisnamukti (2020) mengungkapkan, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selayaknya menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya dengan memahami, namun seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa nilai tersebut juga harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai aktualisasi nilai dan norma Pancasila, perlu disusun pedoman yang sederhana dan praktis sebagai dasar bagi implementasi nilai dan norma Pancasila. Pedoman yang berupa butir-butir Pancasila ini merupakan penjabaran dari pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4). Pada P4, terdapat 36 buah butir Pancasila. Namun, produk hukum ini tidak berlaku lagi sejak adanya Tap MPR no. 1/MPR/2003. Dari 36 butir Pancasila ini dikembangkan lagi menjadi 45 butir-butir Pancasila oleh BP7.

Pedoman implementasi nilai-nilai Pancasila yang terinci ke dalam 45 butir Pancasila tersebut diharapkan dapat lebih mudah dan konkrit dalam pengalaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Indonesia memerlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengamalkan butir-butir Pancasila, sehingga dapat mengamalkan

dalam kehidupan sehari-hari. Langkah konkrit yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem Pendidikan nasional.

Adapun pencapaian yang harus diwujudkan, antara lain: Memanfaatkan teknologi informasi untuk menelusuri data/informasi dalam rangka menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah Pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai prinsip dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Memiliki sikap bertanggung jawab, peduli, jujur, Kerjasama, menghargai pendapat, dan memiliki rasa cinta tanah air dalam mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kerangka Teoritik

Alfred North Whitehead (1864-1947), tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus "menjadi", walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat juga dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan, unsur nilai Pancasila manakah yang harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai tersebut adalah :

Pertama, *nilai dasar*. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat sangat abstrak, bersifat sangat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan

Makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, *nilai instrumental*. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental ini harus mengacu pada nilai dasar yang telah dijabarkan. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang Menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*. Nilai praksis merupakan nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud atau penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealism dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak saja, dan bahkan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program, atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengalamannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang sangat ideal dengan ulasan yang sangat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah tentu jika konsistensi ketiga nilai tersebut dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah justru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut.

Untuk menjaga konsistensi dalam megaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu Pancasila secara formal yang abstrak, umum, dan universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila secara formal sebagai *kategori tematis* (berupa konsep dan teori) menjadi *kategori imperatif* (berupa norma-norma) dan *kategori operatif* (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa ada masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian (Suwarno, 1993 : 110-111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan.

Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati negara Pancasila dalam berbagai seginya. Sekiranya tidak tepat membuat “sakral” dan tabu berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas, dan sempurna sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itulah yang membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku, tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman. Meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal yang harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Dari beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut untuk selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila

sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A. N. Whitehead, setiap satuan actual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-kan yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperative), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke – 4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi : wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke – 3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi: faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke – 1, ke – 2, dan ke – 5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan, dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126).

Pendahuluan:

- Gambarkan latar belakang pentingnya aktualisasi Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia.
- Jelaskan mengapa perlu memahami potensi radikalisme yang mungkin muncul dari interpretasi atau implementasi Pancasila.

Analisis Nilai-nilai Pancasila:

- Rinci nilai-nilai dasar Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat.
- Tinjau kemungkinan penafsiran yang berpotensi radikal atau ekstrem dan bagaimana hal ini bisa terjadi.

Implementasi Pancasila dalam Konteks Sosial-Politik:

- Analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan, regulasi, dan tindakan pemerintah.
- Tinjau apakah implementasi tersebut memberikan ruang bagi interpretasi radikal atau ekstrem.

Dampak Radikalisme:

- Identifikasi dampak potensial dari radikalisme yang berakar pada interpretasi ekstrem nilai-nilai Pancasila.
- Tinjau konsekuensi terhadap stabilitas sosial dan politik, serta ancaman terhadap keberagaman dan toleransi.

Upaya Mitigasi:

- Sarankan langkah-langkah konkret untuk mengatasi potensi radikalisme, seperti peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila.
- Diskusikan peran lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat dalam memitigasi risiko tersebut.

Kesimpulan:

- Ringkas temuan utama dari analisis mengenai aktualisasi Pancasila sebagai sumber radikalisme.
- Sajikan rekomendasi konkret untuk menjaga keseimbangan antara aktualisasi Pancasila dan mencegah radikalisme.

1.2. Perubahan dan Pembaharuan

Pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Terjadinya proses perubahan (dinamika) dalam aktualisasi nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam (potensi) Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berelasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila bersumber pada aktivitas di dalam menyerap atau menerima dan menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur dari luar (asing). Contoh paling jelas dari terjadinya perubahan transformatif dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, adalah empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR pada tahun 1999, 2000,

2001, dan tahun 2002.

Akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi khususnya teknologi komunikasi, terjadilah perubahan pola hidup masyarakat yang begitu cepat. Tidak satupun bangsa dan negara yang mampu mengisolir diri dan menutup rapat dari pengaruh budaya asing, demikian juga terhadap masalah ideologi. Dalam kaitan ini, M. Habib Mustopo (1992: 11-12) menyatakan, bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai Pancasila akan menimbulkan kebingungan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi komunikasi & transportasi ikut mendorong hubungan antar bangsa semakin erat dan luas. Kondisi ini di satu pihak akan menyadarkan bahwa kehidupan yang mengikat kepentingan nasional tidak luput dari pengaruhnya dan dapat menyinggung kepentingan bangsa lain. Ada semacam kearifan yang harus dipahami, bahwa dalam kehidupan dewasa ini, teknologi sebagai bagian budaya manusia telah jauh mempengaruhi tata kehidupan semacam ini, tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan yang tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya paham kebangsaan. Beberapa informasi dalam berbagai ragam bentuk dan isinya tidak dapat selalu diawasi atau dicegah begitu saja. Mengingkari dan tidak mau tahu "tawaran" atayu pengaruh nilai-nilai asing merupakan kesesatan berpikir, yang seolah-olah menganggap bahwa ada *eksistensi* yang bisa berdiri sendiri. Kesalahan berpikir demikian oleh Whitehead disebut sebagai *the fallacy of misplaced concreteness* (Damarjati Supadjar, 1990: 68). Jika pengaruh itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau tidak mendukung bagi terciptanya kondisi yang sesuai dengan Pancasila, maka perlu dikembangkan sikap yang kritis terutama terhadap gagasan-gagasan, ide-ide, yang datangnya dari luar.

Dalam konteks budaya, masalah pertemuan kebudayaan bukan masalah memfilter atau menyaring budaya asing. Akan tetapi mengolah dan mengkreasi dalam interaksi dinamik, sehingga tercipta sesuatu yang baru. Jati diri bangsa, budaya politik adalah sesuatu yang harus terus menerus dikonstruksikan, karena bukan kenyataan yang mandeg (Sastrapradteja, 1996: 11). Kalau ideologi-ideologi besar di dunia sekarang ini dapat diperhatikan dengan seksama, maka mereka terlihat bergeser secara dinamik. Para penyangga ideologi itu telah melakukan revisi, pembaharuan, dan pemantapan-pemantapan dalam mengaktualisasikan ideologinya. Perkembangan zaman menuntut bahwa ideologi harus memiliki nafas baru, semangat baru dengan corak nilai, ajaran dan konsep kunci mengenai kehidupan yang memiliki perspektif baru. Ideologi Pancasila pun dituntut demikian, Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern dan latar belakang

filsafatnya yang berasal dari luar.

Prof. Notonegoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar tersebut, yaitu secara selektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilosofan dari luar tersebut. Tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bersifat terbuka terhadap pengaruh baru dari luar dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur filsafat Pancasila (Sri Soeprapto, 1995: 34). Sepaham dengan Prof. Notonegoro, Dibyasuharda (1990: 229) mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur atau sistem yang terbuka secara dinamik, yang dapat menggarap apa yang datang dari luar, dalam arti luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya ke luar, mempengaruhi dan mengkreasi.

Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di masa mendatang. Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasarkan pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi, bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila bisa ditawarkan dan berpengaruh, serta menyokong kepada kebudayaan atau ideologi lain. Bahkan Soerjanto Poespowardjo (1989: 14) menjelaskan, bahwa dinamika yang ada pada aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampak sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya.

Ideologi Pancasila bukanlah pseudo reiligi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional. Konsekuensinya, bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Dengan begitu ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreativitas dalam

konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai baru dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, social, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dipertimbangkan dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi (1994: 57), bangsa Indonesia sebagai pengemban ideologi Pancasila, tidak defensive dan tertutup sehingga sesuatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya, tidak diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu amorf, sehingga segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diintegrasikan dalam pengembangan dirinya.

Bangsa Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam dialog dengan bangsa-bangsa lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam pergaulan dunia. Bangsa Indonesia harus mampu ikut bermain dalam interaksi Mondial dalam menentukan arah kehidupan manusia seluruhnya. Untuk bisa menjalankan peran itu, bangsa Indonesia sendiri harus mempunyai kesatuan nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukanlah sesuatu yang tertutup tetapi sesuatu yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok masyarakat bangsa, negara, manusia, sistem masyarakat dunia (Sastrapradteja, 1996: 3).

Semuanya itu mengharuskan adanya strategi kebudayaan yang mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Abdulkadir Besar (1994: 35) menawarkan pelaksanaan “strategi dialog antar budaya” dalam menghadapi gejala penyeragaman atau globalisasi dewasa ini. Artinya, membiarkan budaya asing yang mengglobal berdampingan dengan budaya asli. Melalui interaksi yang terus menerus, masing-masing budaya akan mendapatkan Pelajaran yang berharga. Hasil akhir yang diharapkan dari interaksi itu adalah terpeliharanya cukup diferensiasi, sekaligus tercegahnya penyeragaman universal. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak berhenti, melainkan harus diperbaharui secara terus menerus, sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam memperkembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan sekaligus diarahkan bagi

terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampakkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda harus mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa mendatang sehingga tergambarkan aspek historisnya (Hardono Hadi, 1994: 76). Kesinambungan tidak berarti hanya penanggulangan atau pelestarian secara persis dari apa yang dihasilkan di masa lampau untuk diterapkan pada masa kini dan masa mendatang. Unsur yang sama dan permanen maupun unsur yang kreatif dan baru, semuanya harus dirajut dalam satu kesatuan yang integral.

Teori hilemorfisme dari Aristoteles bisa mendukung pandangan tersebut. Aristoteles menegaskan, bahwa meskipun materi (hyle) menjadi nyata bila dibentuk (morfe), namun materi tidaklah pasif. Artinya ada gerak di setiap realitas yang sudah berbentuk (berdasar materi) dapat juga menjadi materi bagi bentuk yang lain, sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Perubahan yang ada bukan kebaruan sama sekali namun perubahan yang kesinambungan. Artinya, aktualisasi yang ada sekarang berdasar pada realitas yang telah ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan yang bisa disampaikan yaitu menyadarkan bahwa nilai-nilai Pancasila jangan sampai luntur meskipun arus globalisasi semakin kuat. Mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menguatkan rasa cinta kita terhadap Pancasila dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan aturan yang mengikat bangsa Indonesia agar tidak salah arah dalam mencapai suatu tujuan dalam berbangsa dan bernegara.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut untuk selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Pada dasarnya, setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperative), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu Pancasila secara formal yang abstrak, umum, dan universal. Hal itu dapat ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang

kenegaraan, politik, dan pribadi.

Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di masa mendatang. Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasarkan pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi. Bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila bisa ditawarkan dan berpengaruh, serta menyokong kepada kebudayaan atau ideologi lain.

Ideologi Pancasila bukanlah pseudo religi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional. Konsekuensinya bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Dengan begitu, ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik.

Pembahasan artikel tentang aktualisasi Pancasila sebagai radikalisme dapat dilakukan dengan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial dan politik. Identifikasi bagaimana pemahaman dan praktik aktualisasi Pancasila dapat menjadi sumber radikalisme atau ekstremisme. Tinjau dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta saran-saran untuk memitigasi potensi radikalisme melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- . 1975. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- . 1984 (Cet.Keenam). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- . 1995/1996. "Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum di Indonesia", dalam Majalah Mimbar No. 74 tahun XIII.
- . 1993 (Cet.ke-12). Filsafat Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Abdulkadir* Besar. 1994. Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi). Yogyakarta: Panitia Seminar "Globalisasi Kebudayaan dan

Ketahanan Ideologi” 16-17 November 1994 di UGM.

Bachtiar, Harsja W. (Peny.).1976. Percakapan dengan Sidney Hook tentang Masalah Filsafat. Jakarta: Jambatan.

Bakker, Anton.1992. Ontologi atau Metafisika Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Bertens. Kess. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.

Bracher, Karl Dietrich. 1984. The Age of Ideologies. New York: St.Martin’s Press.

Damardjati Supadjar.1990. Konsep Kefilsafatan tentang Tuhan Menurut Alfred Nort Whitehead. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.

Dibyasuharda. 1990.Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.

Driyarkara, N.1959. Pantjasila dan Religi. Yogyakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Pantjasila I di Yogyakarta tanggal 16 sampai 20 Februari.

Habermas, Jurgen.1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.

Habib Mustopo, M.1992. Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas. Bandungan-Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional MKDU Pendidikan Pancasila Dosen-dosen PTN/PTS dan Kedinasan Pada tanggal 29 – 30 September 1992.

Hardono Hadi, P. 1994.Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Kansil, C.S.T.1971. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pradnya Paramita. Kattsoff, Louis O.1953. Elements of Philosophy. New York: The Ronald Press Comp. Kendall, G.A. 1981. “Ideology: An Essay in Definition” dalam majalah Philophy Today No.25, hal. 262

Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka. Magelang: Panitia Temu Karya Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.

Leahy, Louis. 1993. “Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis”. Yogyakarta: dalam Majalah Basis No.42, halaman 130 – 135.

Liek Wilardjo. 1990.Realita dan Desiderata. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Lorens Bagus. 1991. Metafisika. Jakarta: PT Gramedia.

Magnis Suseno, Franz. 1991. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: PT Gramedia

Mannheim, Karl. 1991. Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Moerdino. 1995/1996. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas”, dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.

Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. 1990. Megatrends 2000 (Sepuluh Arah Baru untuk

- Tahun 1990-an). Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Notonagoro. 1974 (Cet.Kelima). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Popkin, Richard, dan Avrum Stroll. 1958. Philosophy Made Simple. New York: Made Sample Books, Inc.
- Pranarka A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.
- Sartono Kartodirdjo. 1990. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sastrapratedja,M. 1996. Pancasila dan Globalisasi. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.
- Slamet Sutrisno. 1986. Pancasila sebagai Metode. Yogyakarta: Liberty.
- Snyder, Louis L. 1954. The Meaning of Nationalism. New Brunswick-New Jersey: Rutger University Press.
- Soedjati Djiwandono, J. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan. Jakarta: CSIS.
- Soerjanto Poespowardojo. 1989. Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia. Sudarmanto, JB. 1987. Agama dan Ideologi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudarminta, J. 1991. Filsafat Proses (Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Whitehead).Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Traer, Robert. 1991. Faith in Human Rights. Washington DC: Georgetown Univ.Press.
- Whitehead, Alfred North. 1979. Process and Reality. New York: The Free Press.
- William Ebenstein & Edwin Fogelman. 11985. Today's Isms. London: Prentice-Hall,Inc.
- Soekanto, S. (tahun). "Pancasila dan Tantangan Radikalisme: Analisis Konsep dan Implementasi." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, volume(X), halaman-berkisar.
- Wahid, A. (tahun). "Reinterpretasi Pancasila dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer." Jurnal Kajian Politik, volume(X), halaman-berkisar.
- Suryadi, A. (tahun). "Implikasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Keberagaman: Studi Kasus tentang Radikalisme." Jurnal Studi Kebijakan dan Sosial, volume(X), halaman-berkisar.
- Permana, R. (tahun). "Dinamika Interpretasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila: Implikasinya terhadap Radikalisme." Jurnal Kajian Kebijakan Publik, volume(X),

halaman-berkisar.

Rahayu, S. (tahun). "Pancasila sebagai Instrumen Pencegahan Radikalisme di Era Modern."
Jurnal Psikologi Sosial, volume(X), halaman-berkisar.

I Wayan, T.E. (2017, Januari). *AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA*. From media.neliti.com:
[https://media.neliti.com/media/publications/266370-aktualisasi-nilai-pancasila-
dalam-kehidu-8e2cb993.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/266370-aktualisasi-nilai-pancasila-dalam-kehidu-8e2cb993.pdf)

